

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Al. 2006, *Manajemen Pengawasan Refleksi & Kesaksian Seorang Auditor*, Kalam Indonesia: ciputat
- Anggraini, Jum. 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Azwar, Saifuddin. 1998, *Metode Penelitian* Cet. VI Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bohari, H. 1986, *Pengawasan Keuangan Negara*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadi, Sutrisno. 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2004, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor
- LAN RI, 1996., *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia(jilid 2 edisi 3)*. PT Toko Buku Gunung Agung: Jakarta
- Masriani, Yulies Tiena. 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah. 2014, *Manajemen Pegawai Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nawawi, Handari. 1994, *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga: Jakarta.
- Ridwan HR. 2002, "*Hukum Administrasi Negara*". Rajawali Press. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983, "*Penegakan Hukum*", Bina Cipta: Bandung, hlm. 80
- Sunggono, Bambang. 1997, *Metodologi Penelitian Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana. 2012, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Tobing, GHS Lumban. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III Erlangga, Jakarta.
- Victor M Sitomorang dan Jusuf Juhir. 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur*. Rineka Cipta: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1209)

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Nomor : W14 – 08296.HM.07.01 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2017 sampai dengan 2020 tanggal 4 Desember 2017

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta Nomor W14 –1165.HM.07.01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Nomor: W14-08296.HM.07.01 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 Dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman Masa Jabatan 2017 sampai dengan Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2018.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Nomor : W14 – 247.Hm.07.01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta Nomor: W14–08296.HM.07.01.Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis

Pengawas Daerah Notaris Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2019

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Nomor : W14 – 254.HM.07.01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Nomor : W14 – 08353.HM.07.01 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengangkatan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Se Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017 sampai dengan 2020 tanggal 7 Januari 2019

Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : W14.HM.07.01 – 1288

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SP DIPA - 013.07.2.409184/2019 Tanggal 5 Desember 2018

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara Pelantikan Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Pengambilan Sumpah Setia Warga Negara Indonesia pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 di Yogyakarta, hlm 3.

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris, Notaris dan Notaris Pengganti di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2018, hlm 3.

Sambutan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Notaris dan Notaris Pengganti di Wisma Tamu, Jl Tamasiswa Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2018, hlm 3.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Fadillah Putri, Nurul. 2018, “Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon)”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Jony Firmanzah, Okta. 2011, “Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris (Studi Di Jakarta Timur)”, *tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Magdalena Tahalele, Juliana. 2012, “Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon)”, *tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Wirjomartani, Winanto. “Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris”, *Makalah*, disampaikan pada acara Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Internet

Kamenkumham Kanwil Yogyakarta, “Sebaran Notaris di Wilayah Yogyakarta”, <http://siemon.kemenkumham.go.id/> diakses 3 Maret 2019.

Wikipedia, “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia” https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia , diakses 9 Juni 2019